

Komunikasi Kontroversial Tokoh Publik 2025: Perspektif Etika Komunikasi Islam dan Moderasi Beragama

Musyaffa¹

Juriana²

Mutia Tanseba Andani³

Nasrul Efendi⁴

Agam Anantama⁵

Corresponding Author: musyaffa@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: This article analyzes controversial communication practices by several public figures in 2025, positioning Islamic communication ethics and religious moderation as the primary normative framework. The study employs critical discourse analysis combined with a literature review on Islamic communication ethics and religious moderation. Data are analyzed through public figures' verbal statements, non-verbal expressions, and netizens' responses as circulated in mass media and social media. The findings reveal that controversial communication by public figures, particularly legislative officials, is widely perceived as inconsistent with core principles of Islamic communication ethics, including *qaulān ma'rūfān*, *qaulān sadīdan*, and *qaulān layyīnan*. This study emphasizes that internalizing Islamic communication ethics and religious moderation is essential for public communication to maintain social order, strengthen public trust, and prevent social unrest and potential disintegration.

Keywords: Public figures, Islamic communication ethics, religious moderation, controversial public communication.

Abstrak: Artikel ini menganalisis praktik komunikasi kontroversial yang dilakukan sejumlah tokoh publik pada tahun 2025 dengan menempatkan etika komunikasi Islam dan moderasi beragama sebagai kerangka normatif utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis yang dipadukan dengan studi pustaka literatur etika komunikasi Islam dan moderasi beragama. Data dianalisis melalui penelaahan pernyataan verbal, ekspresi non-verbal tokoh publik, serta respons warganet pada praktik komunikasi tersebut di media massa dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kontroversial yang dilakukan tokoh publik, khususnya anggota legislatif, dipersepsikan bertentangan fondasi etika komunikasi Islam, seperti prinsip *qaulān ma'rūfān*, *qaulān sadīdan*, dan *qaulān layyīnan*. Penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi etika komunikasi Islam dan nilai moderasi beragama merupakan prasyarat penting praktik komunikasi publik tokoh masyarakat, guna menjaga ketertiban sosial, memperkuat kepercayaan publik, serta mencegah kegaduhan dan potensi disintegrasi sosial.

¹ UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, Indonesia

² IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

³ UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia

⁴ UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

⁵ UIN Jurai Siwo Lampung, Indonesia

Pendahuluan

Pembahasan ini bertujuan untuk menganalisis gaya komunikasi kontroversial tokoh publik di tahun 2025 dalam perspektif komunikasi Islam dan nilai moderasi beragama. Tokoh publik yang dimaksud yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) non-aktif, antara lain: Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan atau Uya Kuya. Pada wacana yang berkembang di media sosial tidak hanya menasar dua tokoh tersebut, namun menyeret nama-nama besar lainnya (Sutrisna & Prabowo, 2025). Gaya komunikasi kontroversial tersebut, lalu dianalisis dengan menggunakan analisis wacana kritis Roger Fowler dan didiskusikan dengan pendekatan teori dan konsep komunikasi Islam dan nilai-nilai moderasi beragama.

Komunikasi Islam sebagai pisau analisis untuk membedah sisi dari gaya komunikasi verbal maupun gaya komunikasi non verbal para tokoh publik yang kontroversial. Sementara, nilai moderasi beragama juga menganalisis fenomena kontroversialnya, hingga menganalisis dampak yang ditimbulkan setelah serangkaian tindakan komunikasi yang telah terjadi. Sebab, ungkapan dan perilaku komunikasi tokoh publik yang dimaksud, terbilang cukup fenomenal sepanjang tahun 2025 ini. Setelah sebelumnya, pada tahun 2024, Da'i kondang asal Jawa Tengah juga mengalami gelombang protes yang masif di media sosial hingga berujung pada pengunduran diri dari utusan khusus presiden bidang moderasi beragama. Gus Miftah biasa dikenal masyarakat, harus menanggung konsekuensi logis dari akibat ungkapan candaan kepada penjual es teh, yang dinilai sebagian besar khalayak bagian dari hal yang tidak etis dan jauh dari nilai-nilai moderat dan nilai-nilai komunikasi Islam (Fikri, 2025).

Tindakan dan gaya komunikasi kontroversial para tokoh publik dimaksud, menimbulkan gejolak dan kegelisahan banyak pihak. Anggota DPR-RI non-aktif dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Ahmad Sahroni mengalami dampak signifikan berupa perusakan dan penjarahan rumah pribadinya. Hal itu terjadi, sebagai akibat dari ucapan verbalnya dengan diksi “orang tolol sedunia” yang ditujukan kepada masyarakat yang memprotes kehadiran legalislatif dan berupaya untuk membubarkan lembaga tersebut. Gelombang

protes dan tanggapan negatif dari khalayak terus masif, dan akhirnya Sahroni mengklarifikasi dengan mengungkapkan bahwa diksi tolol bermakna pintar atau paling pintar. Sementara itu, tindakan Eko Patrio dan Uya Kuya yang asyik berjoget saat sidang paripurna dengan agenda mendengarkan laporan pidato kenegaraan presiden Prabowo Subianto juga menimbulkan huru-hara, sebab sebagian khalayak atau masyarakat menilai tindakan tersebut tidak etis di tengah kesulitan dan kesusahan ekonomi masyarakat. Angka pengangguran yang tinggi, bursa pencari kerja yang tinggi, minimnya lowongan pekerjaan, perputaran ekonomi yang lesu, pemutusan hubungan kerja (phk) terjadi masif. Krisis dan ketimpangan ekonomi itulah, yang menurut sebagian khalayak perlu adanya sensitivitas, atau *sens of crisis* dari para pemegang kekuasaan itu harusnya ada (Elvan Widyatama, 2025).

Ungkapan tolol yang terucap merupakan bentuk dari komunikasi verbal, sementara berjoget-joget merupakan tindakan yang mencerminkan komunikasi non-verbal. Dua hal tersebut menarik untuk dicermati dengan menggunakan konsep dan prinsip komunikasi Islam dan juga nilai moderasi beragama. Dalam literatur komunikasi Islam, berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa yang halus atau lembut (*qoulan layyin*), bahasa yang baik (*qoulan ma'ruf*), bahasa yang mulia (*qoulan karim*), bahasa yang benar (*qoulan sadid*). Sementara dalam bertindak, Islam telah mengajarkan tindakan dan perbuatan harus mulia, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Ahzab ayat 21: "Sungguh, pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu" (Ilaihi, 2010).

Ungkapan verbal dan tindakan komunikasi non-verbal para tokoh publik di atas juga tidak selaras dengan nilai-nilai moderasi beragama. Nilai-nilai moderasi beragama itu berpegang pada kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan. Komunikasi verbal, dengan mengungkapkan diksi tolol/bodoh/goblok dalam komunikasi massa atau komunikasi publik tidak selaras dengan nilai kemanusiaan. Lalu, tindakan berjoget riang di tengah krisis dan penderitaan sebagian masyarakat, juga tidak etis dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai tokoh bangsa, tokoh publik, pejabat negara harus bisa memberikan keteladanan dan upaya keperpihkan pada prinsip

keadilan dan kemanusiaan. Jika tidak, sebagai akibat dari itu semua, memungkinkan terjadinya kericuhan, penjarahan, anarkisme juga sangat tidak dibenarkan, karena itu juga jauh dari nilai-nilai moderasi beragama. Sebab, tidak satupun agama mengajarkan tindakan pengrusakan sebagaimana dimaksud. Namun, akar permasalahannya adalah adanya ungkapan komunikasi verbal dan non-verbal yang kontroversial sebagaimana telah disampaikan di awal.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan pembahasan penulis, dan menyangkut komunikasi kontroversial tokoh publik sebagaimana ditulis Mursyid Fikri yakni berbicara tentang komunikasi dakwah Gus Miftah ditahun 2025. Pembahasannya lebih mengarah pada reaksi umpan balik (*feedback*) warganet menyikapi komunikasi kontroversial Gus Miftah (Fikri, 2025). Ada juga Ervina dkk, pernah membahas komunikasi kontroversial Gus Dur (KH. Abdurrahman Wachid, Presiden ke-4 Republik Indonesia). Adapun hasil pembahasannya, tindakan kontroversial Gus Dur bertujuan untuk menyelamatkan rakyat dari tindakan inkonstitusional (Ervina, Kriyantono, Wulandari, 2019). Jadi tawaran pembahasan komunikasi kontroversial tokoh publik 2025 bisa menjadi hal yang baru, dan belum pernah ada yang membahas sebelumnya.

Oleh sebab itu, penulis memandang penting dan relevan fenomena tersebut dijadikan sebagai pertimbangan akademis. Dengan mengulasnya menggunakan dua pendekatan konsep dan teoritis mengenai komunikasi islam dan sisi nilai moderasi beragamanya. Sehingga, para pihak yang terlibat, para pembaca dapat bermuhasabah, dan beriktibar dari kausalitas yang telah terlewati. Agar, hal-hal demikian tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang. Peristiwa di Nepal bisa jadi berpotensi terjadi di Indonesia, jika cara berkomunikasi publik figur masih banyak yang kontroversial. Dengan demikian, tidaklah salah, penulis mengulasnya dengan judul komunikasi kontroversial tokoh publik 2025, perspektif komunikasi islam dan nilai moderasi beragama.

Komunikasi menurut Larry (Mulyana, 2006) merupakan menafsirkan pertunjukan pesan. Komunikasi dapat dibedakan dengan semua perilaku manusia dan organisasi lainnya karena ia melibatkan proses mental memahami orang, objek, dan peristiwa, maka itulah yang disebut pertunjukkan pesan. Komunikasi lazim sebagai pemindahan atau pertukaran informasi, baik berbentuk kata-kata (dalam pesan tertulis) dan bunyi (dalam pesan terucap). Misalnya informasi menerangkan evaluasi kinerja, dan pendapat pribadi yang dinyatakan dalam surat dan memo, laporan teknis, dan kata.

Terkait komunikasi verbal, sebagaimana diungkapkan (Mulyana, 2011) bahwa komunikasi melalui bahasa verbal menggunakan kata-kata yang merepresentasikan berbagai aspek realitas individual kita, dapat berupa ucapan, tutur, atau tulisan. Menurut penulis, komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan bahasa-bahasa verbal yang disepakati antar kedua belah pihak. Adapun komunikasi verbal berbentuk ujaran atau tulisan

Secara sederhana, pesan nonverbal adalah semua isyarat yang bukan berupa kata-kata. Menurut Larry A. Samonar dan Richar E. Porter, komunikasi nonverbal mencakup semua rangsangan (kecuali rangsangan verbal) dalam suatu *setting* komunikasi yang dihasilkan oleh individu dan penggunaan lingkungan oleh individu, yang mempunyai potensial memiliki makna bagi pengirim atau penerima; kita mengirim pesan nonverbal tanpa menyadari bahwa pesan-pesan tersebut bermakna bagi orang lain (Mulyana, 2011).

Pentingnya pesan non-verbal ini misalkan dilukiskan dalam frase, “bukan apa yang dia katakan, melainkan bagaimana dia mengatakan”. Hal ini, sejalan dengan salah satu prinsip komunikasi bahwa seseorang tidak dapat berkomunikasi, setiap perilaku punya potensi untuk ditafsirkan (Mulyana, 2011). Orang yang terampil membaca

pesan non-verbal orang lain disebut intuitif, sedangkan yang tampil mengirimkannya disebut ekspresif (Mulyana, 2011). Secara garis besar, Larry A. Samovar dan Richard E. Porter membagi pesan-pesan non-verbal menjadi dua kategori besar, yakni; pertama, perilaku yang terdiri dari penampilan dan pakaian, gerakan dan postur tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, bau-bauan, dan parabahasa; kedua, ruang, waktu, dan diam. (Mulyana, 2011).

Kontroversial merupakan bentuk kata sifat, berarti hal-hal yang bersifat menimbulkan perdebatan. Kontroversial berasal dari kata kontroversi. Menurut KBBI, kontroversi mempunyai dua makna. Pertama, kontroversi berarti perdebatan. Kedua, kontroversi bermakna persengketaan, pertentangan. Dari pengertian tersebut, jelas dan tegas, bahwa kontroversial adalah hal-hal yang bersifat menimbulkan sengketa, perdebatan, dan pertentangan di tengah masyarakat dengan berbagai perspektif.

Berdasarkan definisi operasional di atas, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa komunikasi kontroversial merupakan proses pertukaran informasi dan pesan yang berasal dari proses komunikasi yang terjadi, baik melalui bahasa non-verbal, maupun bahasa non-verbal yang hal itu dapat memicu perpecahan, perdebatan, dan persengketaan oleh banyak pihak. Komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan dengan bahasa verbal yang tidak dapat diterima sepenuhnya oleh komunikan, karena bermuatan pertentangan, perdebatan, dan persengketaan. Pesan dan tindakan kontroversial tersebut, bisa saja tidak disadari atau mungkin bisa disadari oleh komunikator, begitu juga sebaliknya, bisa saja pesan yang disampaikan sengaja atau mungkin tidak sengaja dikeluarkan oleh komunikator. Dalam khasanah komunikasi, komunikator merupakan orang yang menyampaikan pesan, sementara komunikan ialah orang yang menerima pesan.

Hefni mengungkapkan, bahwa komunikasi Islam merupakan komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan (Rasyid & Indra, 2024). Hal ini berdasarkan atas konsep dasarnya, bahwa dalam khasanah Islam, komunikasi merujuk pada *ittishal*, dan juga istilah *tawashul*.

Istilah *tawassul* bermakna sampai, maksudnya proses pertukaran informasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang melakukan komunikasi. Adapun, makna *ittishal* lebih menekankan pada ketersambungan pesan. Bahkan, tanpa adanya feedback atau umpan balik (Rasyid & Indra, 2024).

Prinsip komunikasi Islam merujuk pada etika komunikasi Islam, setidaknya ada enam prinsip gaya bicara atau pembicaraan (*qoulan*), yaitu: *Qaulan Sadidan*, *Qaulan Balighan*, *Qoulan Masyrua*, *Qoulan Layyina*, *Qoulan Karima*, dan *Qaulan Ma'rufa*. Pertama, *Qoulan Sadidan*, bermakna perkataan benar, lurus, dan jujur. Hal ini merujuk pada Qs. An-Nisa ayat 9. Kedua, *Qoulan Balighan*, bermakna perkataan yang membekas pada jiwa, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti. Hal ini merujuk pada Qs. An-Nisa ayat 63. Ketiga, *Qoulan Maisyura*, artinya perkataan yang ringan. Hal ini berdasarkan QS. Al-Isra' ayat 28). Keempat, *Qoulan Layyina*, bermakna perkataan yang lemah lembut. Kelima, *Qoulan Karima* bermakna perkataan yang mulia. Hal ini termaktub dalam Qs. Al-Isra ayat 23. Keenam, *Qoulan Ma'rufan* memiliki arti perkataan yang baik (Muslimah, 2016).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, munculnya ide moderasi adalah upaya menghindarkan diri dari kemungkinan berada pada posisinya yang terlalu berlebihan, yang melampaui batas karena terlalu di pinggir sehingga mudah tergelincir. Dia juga merupakan upaya mencari persamaan di antara keragaman, dan bukan mempertajam perbedaan (Saifuddin, 2024).

Penulis berasumsi, bahwa pernyataan Saifuddin tersebut sepertinya berupaya untuk setiap orang agar terhindar dari bahaya laten sikap terlalu berlebihan (*ghulluw*) yang disinyalir dapat membawa seseorang tersebut tersesat, jatuh, dan binasa atas sikapnya. Saifuddin juga menegaskan bahwa moderasi itu upaya untuk mencari titik persamaan dari segala realitas perbedaan. Serta, menurutnya, seseorang tidak perlu mempertajam perbedaan. Artinya, orang yang tidak memiliki sikap moderat atau *washathiyah*, maka akan membahayakan bagi dirinya, orang lain, dan dalam skala lebih luas bisa membahayakan bangsa dan Negara.

Menurut penulis, apa yang diungkapkan oleh Saifuddin tersebut, sejalan dengan pernyataan Rasulullah Saw, yakni: "Tidak boleh ada bahaya, dan saling membahayakan". Selain itu, juga sejalan dengan kaidah fikih, "Mencegah kemafsadatan (kerusakan) lebih utama (didahulukan) dari pada menarik kemaslahatan".

Lukman Hakim Saifuddin merumuskan definisi di atas, disebabkan karena banyaknya gejala-gejala sosial kemasyarakatan yang menimbulkan konflik, kerusakan, dan perpecahan yang semakin masif saat itu. Sebab itu, sikap moderasi beragama dipandang perlu. Alasannya, menurut Saifuddin, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan beragama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama, yaitu yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum, berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Sembilan kata kunci moderasi beragama. Adapun sembilan kata kunci tersebut, antara lain kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan kepada tradisi. Kemenag RI telah meluncurkan konsep moderasi beragama, melalui modul penguatan moderasi beragama tahun 2020-2024. Terkait hal ini, Kemenag RI berlandaskan pada acuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan dasarnya tentu pada pasal 29 ayat (2) UUD 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Landasan yuridis lainnya, yakni pasal 22 ayat (2) dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Landasan berikutnya yakni pasal 2 peraturan Presiden no 83 tahun 2015 tentang Kementerian Agama, bahwa Kemenag mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berikutnya, terdapat klausul pada lampiran III, dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, bahwa program prioritas

memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, menjadi tanggung jawab Kemenag RI. Terakhir, berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 18 tahun 2020 tentang Renstra (Rencana Strategis) Kementerian Agama 2020-2024, tersebut bahwa, kementerian agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong (Modul Penguatan Moderasi Beragama. 2020).

Pada modul yang sama, selain landasan yuridis tentang pentingnya moderasi beragama, juga disebutkan tentang pengertian moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa. Indonesia, beragama pada hakikatnya adalah ber-indonesia dan ber-Indonesia itu pada hakikatnya beragama. Penguatan moderasi beragama pada dasarnya adalah menghadirkan negara sebagai rumah bersama yang adil dan ramah bagi bangsa Indonesia untuk menjalani kehidupan beragama yang rukun, damai, dan makmur. Adapun secara harfiah, moderasi menurut bahasa Indonesia bermakna pengurangan kekerasan dan penghindaran ke-ekstriman. Moderasi dalam bahasa latin, bermakna ke-sedang-an (tidak berlebihan dan tidak kekurangan). Moderasi dalam bahasa Inggris, *core* (inti, esensi), *standard* (Etika). Adapun dalam bahasa Arab, moderasi itu *wasath* atau *wasathiyyah*, yang memiliki pandangan makna dengan kata *tawassuth* (tengah-tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazun* (berimbang). Secara terminologi, menurut Kemenag RI, moderasi merupakan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa.

Setidaknya ada empat indikator utama untuk mengukur keberhasilan moderasi beragama. Keempatnya, antara lain: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap tradisi. Dalam memperkuat muatan moderasi beragama terdapat beberapa pesan dasar yang perlu terus digaungkan. Setidaknya ada tujuh pesan

dasarnya, yakni: memajukan kehidupan umat manusia, menjunjung tinggi keadaban mulia, menghormati harkat martabat kemanusiaan, memperkuat nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, dan menaati komitmen berbangsa.

Prof. Dr. Asnaini, MA menyebutkan bahwa nilai moderasi beragama harus memenuhi nilai-nilai universal, setidaknya ada tiga hal yakni keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian. Hal itu diambil dari muatan pesan keagamaan dalam moderasi beragama yakni memajukan kehidupan umat manusia, menjunjung tinggi keadaban mulia, menghormati harkat martabat manusia, memperkuat nilai moderat, mewujudkan perdamaian, menghargai kemajemukan, dan menaati komitmen kebangsaan (Musyaffa, 2025).

Penggunaan istilah tokoh publik dalam pembahasan ini merujuk pada profesi setiap individu yang dalam konteks ini berstatus sebagai pejabat negara (Harruma, 2025). Para anggota legislatif dan sebagian juga termasuk pimpinan alat kelengkapan dewan, jelas merupakan bagian dari tokoh publik. Perannya sebagai pejuang aspirasi masyarakat, baik dari daerah pemilihannya secara khusus, maupun untuk masyarakat Indonesia secara umum. Tokoh publik juga sebagai *opinion leader*. Tokoh publik sebagai *opinion leader* termasuk pejabat pemerintahan atau pejabat Negara. Sementara itu, tokoh publik selain *opinion leader*, dan hanya berposisi sebagai *influencer* ialah selebriti. Itu level nasional dan regional. Jika tokoh publik level daerah, maka termasuk di dalamnya ada tokoh agama dan tokoh adat (Sugiono & Irwansyah, 2019).

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan paradigma kualitatif. Teks dan narasi serta wacana seputar komunikasi kontroversial yang diungkapkan oleh Ahmad Sahroni dan Eko Patrio atau juga Uya Kuya menjadi dokumen penting untuk dianalisis. Telaah terkait dengan potongan video atau teks berita terkait, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori

dan konsep komunikasi Islam dan nilai moderasi beragama.

Dokumen terkait yang dianalisis yakni dokumen yang muncul sejak tanggal 15 Agustus hingga awal September 2025. Analisis dokumen diambil dari dokumen terkait baik berupa ulasan berita teks maupun video yang kredibel dari kantor berita yang terverifikasi oleh dewan pers. Selanjutnya, dokumen yang ada dianalisis dengan pendekatan analisis wacana model Roger Fowler dkk. Model analisis wacana ini seperti sebuah model analisis wacana *critical linguistic* dalam konteks bahasa sebagai praktik sosial untuk menempatkan dan menyebarkan ideologi kelompok (mengenai kata dan kalimat) (Sugiyono & Lestari, 2021). Hal tersebut bertujuan untuk menganalisis makna atas wacana yang mencuat baik makna denotasi maupun konotasi, baik makna tekstual maupun kontekstual. Lalu, hasil dari analisis dokumen kemudian ditelaah dengan pendekatan dan teori yang relevan dengan komunikasi Islam dan nilai moderasi beragama.

Adapun situs berita atau saluran media yang digunakan, penulis berhati-hati dengan memilih lembaga berita yang kredibel yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Misal, tayangan Kompas.com dengan judul Sahroni jelaskan "orang tolol sedunia saat respons....". Lalu, tayangan Tribunnews.com, berjudul sederet ucapan kontroversi Ahmad Sahroni yang kini. Lalu, Serambinews, dengan tayangan berjudul, "Viral! Heboh Ucapkan 'Orang Tolol Sedunia', Ahmad...". Kemudian, Kompas tv Sorong, penayangannya mencapai 1,5 juta, dengan judul, "Sahroni Ucapkan Kata Tak Pantas ke Pendemo. Tempo.co juga menayangkan dengan judul "Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahrono merespons kritik....". tayangan berita Tempo.co berhasil membukukan 6.8 juta viewers. Berikutnya, Warta Kota, "Pernyataan Ahmad Sahroni ini bikin geger Indonesia dan...". Beberapa media tersebut dinilai penulis kredibel dan sudah cukup untuk dianalisis dengan pendekatan analisis wacana dan juga ditinjau dari sudut pandang etika dan prinsip komunikasi Islam dan nilai-nilai moderasi beragama.

Penulis memasukkan kata kunci yang familiar digunakan oleh khalayak atau *netizen* dalam mesin pencari *google chrome*. Hasilnya,

terdapat kata kunci yang otomatis muncul dan yang relevan dengan pembahasan ini, seperti video joget DPR, video asli DPR joget, dan video viral anggota DPR joget. Beberapa frase kunci tersebut dipandang oleh penulis relevan dengan topik, dan masuk dalam kategori unit analisis atas komunikasi non-verbal kontroversial.

Sementara itu, terkait dengan kategori komunikasi verbal yang kontroversi dan relevan dengan penelitian ini jika dimasukkan ke mesin pencari *google chrome*, yakni video ungkapan Sahroni DPR. Termasuk jika kita memasukkan frase kunci, ungkapan tolol DPR, ungkapan tolol Sahroni DPR, dan ungkapan tolol Sahroni. Maka, hal tersebut bagian dari unit analisis pada kategori komunikasi verbal kontroversial.

Hasil dan Pembahasan

Kontroversi Ungkapan “Orang Tolol Sedunia” dalam Komunikasi Politik

Orang tolol sedunia, menjadi ucapan paling fenomenal sepanjang tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPR-RI saat itu, Ahmad Sahroni. Sahroni mengungkapkan kekesalannya kepada pihak yang menginginkan pembubaran lembaga legislatif, DPR-RI. Ia menyampaikan hal itu saat kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Lantas, ucapannya menjadi bahan komoditas produk jurnalistik oleh sebagian besar awak media. Serta, ungkapan tersebut, menuai kontroversi dari warganet atau *netizen*, hingga *trending topic* di berbagai *platform* media sosial (Rahyuni, 2025).

Atas pernyataan itu pula, banyak warganet dan para pegiat media sosial atau *influencer*, membuat video reaktif atau video paradoks. Tidak satupun yang memuji ungkapan tersebut. Semua orang memberikan reaksi penolakan. Seorang *influencer*, Salsa Erwina berani menantang debat Sahroni atas ungkapan orang tolol sedunia. Selain itu, ada juga mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Oegroseno merasa tersinggung dan marah dengan pernyataan Sahroni, sebab

Oegroseno merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Pengamat politik kondang, Rocky Gerung juga menyebut ungkapan Sahroni itu bentuk melupakan amanah suara publik yang telah menjadikannya sebagai anggota legislatif.

Jelas, bahwa semua dokumen pemberitaan terkait ungkapan Sahroni, menegaskan frase orang tolol sedunia, merupakan contoh bahasa verbal tidak baik. Pola komunikasi verbal yang kotor dan terkesan menghina semestinya tidak muncul dari para anggota legislatif. Sebab hal itu tidak sesuai dengan prinsip komunikasi Islam. Kata yang mengandung makna penghinaan. Hanya akan membuat banyak orang marah, kecewa, dan sakit hati. Kata tersebut merupakan kasar dan arogan.

Jika ditinjau dari analisis wacana kritis model Roger Fower dkk, jelas bahwa ungkapan itu ditujukan untuk “menghajar” mereka yang bersuara dan berpikir untuk membubarkan DPR. Bukannya, dengan mengungkapkan kata itu, akan mengilangkan wacana pembubaran DPR, justru sebaliknya. Ungkapan tolol membuat citra DPR semakin turun dan terjun bebas di posisi nadir. Ungkapan untuk men-*counter* serangan kepada DPR, justru menjadi angin segar bagi orang banyak menyerang lembaga tersebut. Tidak menguatkan institusi legislatif, justru semakin melemahkan institusi legislatif. Khalayak semakin marah dan antipati kepada wakil rakyat di Senayan.

Kontestasi Makna dan Kegagalan Klarifikasi Diskursif

Beredar luas di media sosial pernyataan klarifikasi yang sporadis oleh Sahroni, pada 26 Agustus 2025. Dia menjelaskan bahwa kata tolol menurutnya berarti pinter/pintar. Menurutnya, makna orang tolol sedunia memiliki arti, orang pintar sedunia. Sebagaimana pernyataan lengkapnya, "bagi saya, kata tolol itu artinya *pinter*, jadi kalau saya bilang, orang tolol sedunia, itu artinya orang pinter di dunia, paham?", ungkap Sahroni kepada awak media. Padahal dalam KBBI, jelas maknanya, bahwa kata tolol berarti sangat bodoh; bebal. Sebagai misal dari KBBI, dicontohkan dengan kalimat, Aku lupa menanyakan nama dan nomor telepon wanita itu, betapa tololnya aku.

Belakangan, Sahroni yang saat itu masih duduk sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR-RI berupaya menjelaskan bahwa kata tolol tidak ditujukan ke masyarakat secara umum. Ia beranggapan, bahwa kata tolol yang sebenarnya merujuk pada mereka yang masih berupaya menginginkan pembubaran lembaga legislatif. Hal itu menurutnya akan berakibat terhadap sistem demokrasi (Sutrisna & Ramadhan, 2025). Meskipun demikian, pemilihan diksi tolol dihadapan awak media dan menjadi konsumsi publik sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang termuat dalam moderasi beragama, juga tidak sesuai dengan prinsip etika komunikasi Islam.

Pemaknaan tolol sudah menjadi pemahaman universal. Seluruh orang akan sepakat dengan makna yang sepadan dengan kata bodoh, atau goblok, dan sejenisnya. Kata-kata tersebut tidak sopan. Kata itu jauh dari nilai etika. Mengarahkan pada sikap emosional dan penghinaan. Terlebih, hal itu diungkapkan dari seorang pejabat teras, anggota legislatif aktif. Maka, dengan demikian, kata tolol bermakna pintar merupakan klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan tidak memenuhi unsur *general truth*, atau kebenaran umum.

Komunikasi Non-Verbal sebagai Penguat Makna Diskursif: Ekspresi Wajah & Intonasi

Mimik muka atau ekspresi wajah Sahroni dengan jelas menguatkan pesan meremehkan, marah, dan kesombongan yang secara nyata ditujukan kepada pihak yang menginginkan adanya pembubaran DPR. Intonasi atau tinggi rendahnya nada saat menyampaikan kalimat tidak baik tersebut, juga dapat dimaknai sebagai sikap tegas dan semakin menguatkan arah dan tujuan kata kasar tersebut. Hal itu dapat dimaknai, sebagai bentuk pembelaan Sahroni bagi pihak-pihak yang ingin membubarkan DPR-RI. Namun, gaya komunikasi non verbal tersebut justru menjadi dasar bagi warganet atau khalayak semakin membenci, marah, dan antipati.

Memang, pada dasarnya Indonesia secara politik hukumnya, menganut paham *trias politica*. Paham ini bertujuan menjelaskan, bahwa adanya keseimbangan jalannya pemerintahan suatu Negara,

dengan menyelaraskan peran dan fungsi maksimal pada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pihak eksekutif yakni pemerintah atau kementerian/lembaga/badan. Sementara itu, pihak yudikatif direpresentasikan dengan adanya DPR-RI. Lalu, demi tegaknya yuripudensi atau hukum, maka perlu adanya lembaga penegak hukum, seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pelanggaran Prinsip *Qaulān Ma'rūfan* dalam Komunikasi Publik

Qoulan Makrufan, atau pernyataan yang mulia sebagaimana dijabarkan pada bagian sebelumnya, jelas bahwa seorang muslim hendaknya mengungkapkan kata-kata yang mulia. Artinya, seorang muslim harus berupaya menanggalkan dan meninggalkan ungkapan yang tidak baik, tabu, kotor, hina, dan memalukan tersebut. Rasulullah Saw juga kerap menyebutkan bahwa tanda orang yang beriman kepada Allah Swt dan hari kiamat atau hari akhir, yakni seseorang yang mampu berkata baik, atau jika tidak mampu berkata baik, lebih baik diam (Aulia & Adawiyah, 2024). Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam...." (HR. Bukhari, No. 6475 dan Muslim No. 47).

Jika berkaca dengan hadis shahih di atas, maka harusnya Sahroni berpikir panjang untuk mengungkapkan diksi orang tolol sedunia di hadapan awak media massa. Jika, Dia mendapati ketidaksetujuan terhadap aspirasi sebagian orang yang mewacanakan pembubaran DPR, maka ia harusnya menanggapi dengan serius, sopan, dan elegan. Misal, ia lebih baik mengungkapkan kalimat seperti, wacana pihak lain membubarkan DPR kami tanggap dengan serius. Sebab, itu bentuk salah satu kritik dan kontrol sosial kepada wakil rakyat agar lebih aspiratif memperjuangkan hak-hak dasar dan kesejahteraan rakyatnya. Kami, harus meresponsnya dengan melakukan introspeksi diri, mawas diri, muhasabah diri, agar meningkatkan kerja-kerja dalam tugas dan fungsi sebagai pengawas program pemerintah, merumuskan dan mengesahkan produk perundangan atau peraturan, hingga memperhatikan alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan ekonomi di masyarakat. Atau, pilihan sebagai alternatif yang bijak, yaitu

berdiam diri terhadap persoalan yang mengemuka. Misal, lebih baik diam tanpa kata, atau mengarahkan awak media kepada bagian *public relations* DPR-RI. Atau, Sahroni, dapat saja mengarahkan wawancara langsung kepada unsur pimpinan DPR-RI.

Kembali ke hadis di atas. Hadis di atas sepertinya memang sesuai dengan kondisi saat ini yang penyebaran kalimat negatif, juga kalimat hinaan dan celaan yang tidak baik itu semakin tidak menentu di era media sosial. Sebagaimana *asbabul wurud* hadis tersebut, yakni kisah Muhammad bin Abdullah mendapat perilaku buruk dari tetangganya (Lestari & HS, 2020). Adapun manfaat menjaga ucapan, antara lain: menegaskan seseorang dalam status agamanya, mendapatkan keutamaan dari Allah dan Rasulullah, terjamin masuk surga, derajatnya naik, terhindar dari dosa-dosa lisan (Puniman, 2018).

Sahroni berkata tidak baik seperti itu mencerminkan kadar keimanannya sebenarnya pada titik nadir. Sebab, perilaku seseorang sangat terkait erat dengan keimanannya kepada Allah dan hari akhir/kiamat. Fenomena menurunnya derajat moral seseorang mengakibatkan kerusakan pada masyarakat bahkan bangsa. Setidaknya, kalimat hina 'Orang tolol sedunia' telah membuat banyak orang tidak tentram, kecewa, marah, sakit hati, tidak nyaman (Khanifah dkk, 2024). Maka dari itu, gaya komunikasi kontroversi sangat tidak etis dan menciderai nilai beragama. Apalagi, jika tokoh publik tersebut merupakan orang muslim, dan mestinya menyadari bahwa kata Ahmad yang melekat pada namanya, sebagai nasihat dan pengingat agar berhati-hati dalam bicara dan berperilaku.

Ketidaksesuaian Klarifikasi Ujaran Publik dengan Prinsip *Qaulān Sadīdan*

Islam mengajarkan pemeluknya untuk mengedepankan ucapan dan sikap yang benar. Seorang muslim harusnya berbicara yang benar, tidak bohong, dan tidak mengada-ada. Ungkapan Sahroni, bahwa orang tolol itu berarti orang pintar maka tidak sesuai dengan referensi manapun dan prinsip kebenaran umum atau *general truth*. Oleh sebab itu, ucapan tersebut salah dan mengada-ada tanpa ada alasan argumentatif yang akademis.

Allah Swt menyuruh manusia untuk berkata yang benar sebagaimana tersebut dalam Qs. An-Nisa ayat 9. Perintah berkata benar dan jujur pada ayat tersebut, ditujukan kepada anak. Harus ada tanggung jawab moral terhadap masa depan generasi bangsa terutama kaitannya dengan pembangunan karakter sumber daya manusia (Sukmaningtyas, dkk. 2024). Prof. Quraish Shihab menjelaskan, bahwa kata *sadidan* pada ayat ini ditafsirkan tidak sekedar berarti benar, namun juga tepat sasaran. Pesan komunikasi disampaikan sesuai tempatnya, bersifat mendidik, dan apabila pesan tersebut bermuatan kritik, maka kritik konstruktif (Faridah, dkk. 2023). Maka, dengan demikian, ungkapan Sahroni sebagai tokoh publik, selain tidak etis juga tidak ada unsur mendidik, juga tidak ada saran konstruktif. Mencerminkan sikap tidak selaras dengan prinsip *Qoulan Sadidan*.

Bahasa Tubuh dan Ketidaksesuaian Etika Non-Verbal Islami

Apa yang ditunjukkan dari mimik muka dan intonasi tersebut, mengindikasikan Sahroni melemahkan atau melecehkan orang lain. Dengan diksi dari frase tersebut, ditambah dengan raut muka yang menegaskan bahwa kata-kata tersebut benar-benar membuat orang lain diremehkan dan dilecehkan. Hal itu juga termasuk kategori mengolok-ngolok suatu kaum. Sebagaimana tersebut dalam Qs. Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar buruk...." (Noor, 2025).

Lubis dalam artikel jurnalnya, menyebutkan bahwa pentingnya menjaga komunikasi non-verbal dengan tidak bermuka masam selaras dengan Qs. Abasa ayat 1-10. Lubis mengungkapkan, bahwa ada beberapa hikmah untuk menjaga komunikasi non-verbal itu. Hikmah-hikmah tersebut, antara lain tidak bersikap diskriminatif, menilai seseorang bukan dari harta, pangkat, kekayaan. Lalu, hikmah terakhir, bahwa sikap dan bahasa tubuh ternyata sangat berdampak kepada komunikasi, khalayak, atau netizen, bahkan *audiens*. Maka, sebaiknya

berupaya keras untuk menghindari bahasa tubuh/*gesture* yang demikian (Lubis, 2018).

Bahasa Konfrontatif dan Tantangan Moderasi Beragama

Indonesia bukan negara Islam, tetapi negara beragama. Maksudnya, Indonesia berdasarkan UUD 1945 Pasal 29 jelas, bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai orang bernegara sekaligus beragama, sudah semestinya mengamalkan nilai dan konsep ajaran agama secara benar dan komprehensif. Sahroni yang beragama Islam, seharusnya mengacu pada nilai-nilai ajaran Islam yang moderat. Lantas, jika hal itu dilakukan, maka tidak ada ungkapan, sikap dan tindakan yang dapat menciderasi nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian. Sebab, dengan proses internalisasi moderasi beragama, maka akan berpotensi mewujudkan perdamaian dan kemanusiaan, sebab moderasi beragama merupakan jalan tengah menuju perdamaian berbasis nilai-nilai universal (Suherdiyanto, dkk. 2025). Ungkapan tolol kepada khalayak tersebut, merupakan sikap egosentrisme seorang Sahroni. Ia terlalu berpihak kepada egonya sendiri. Tanpa, berupaya mengambil sikap tengah terhadap wacana pembubaran DPR. Alhasil, terungkap kata yang menimbulkan kericuhan, gejolak, dan demonstrasi besar.

Simbolisme Non-Verbal dan Krisis Empati Pejabat Publik

Jika Sahroni melakukan sikap konyol berupa komunikasi kontroversial. Komunikasi non-verbalnya kontroversial, ditegaskan lagi dengan komunikasi non-verbalnya pula. Tentu, hal tersebut telah memicu kemarahan khalayak luas. Namun, kemarahan massa, sebenarnya telah dipantik dengan perilaku yang kurang empati dari anggota dewan lainnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh Uya Kuya dan Eko Patrio dari fraksi PAN di Senayan. Hal itu juga memicu kemarahan publik (Leni, 2025). Sebab, tidak etis ditengah gelombang krisis dan PHK yang banyak dialami oleh masyarakat luas. Sebagian warganet atau netizen berkomentar negatif terhadap aksi joget riang di gedung DPR-RI. Harusnya, ditengah stabilitas ekonomi yang tidak menentu, kegiatan berjoget ria mestinya ditiadakan. Walaupun,

menurut Eko Patrio, hal itu spontanitas dan bagian dari apresiasi dari kelompok *orchestra* yang tampil. Menurutnya, hal itu tidak dimaksudkan untuk menari di atas penderitaan rakyat, sebagaimana dimaksud oleh sebagian masyarakat (Subagio, 2025).

Selain Eko Patrio yang mengklarifikasi hal itu, ada juga Adies Kadir yang juga Wakil Ketua DPR-RI yang menganggap hal itu masih dalam taraf normal dan wajar (Muliawati, 2025). Sama halnya, dengan politisi lainnya, yang menjabat sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ahmad Muzani, yang berpendapat bahwa aksi joget ria di gedung DPR adalah hal yang normal. Menurutnya, joget seperti yang dilakukan pejabat bukanlah persoalan serius. Menurutnya, musik sebagai sarana hiburan dalam acara kenegaraan justru menjadi sarana untuk mencairkan suasana (Rohman, 2025).

Namun, lagi-lagi, masyarakat tetap ada yang menilai hal itu belum cocok dilakukan, ditengah sulitnya masyarakat. Mungkin, masyarakat membolehkan joget di acara kenegaraan ketika keadaan ekonomi bangsa membaik dan masyarakat sejahtera.

Simpulan

Fenomena komunikasi kontroversial yang dipertontonkan oleh sejumlah tokoh publik sepanjang tahun 2025 menunjukkan adanya problem serius dalam praktik komunikasi publik, baik secara verbal maupun non-verbal. Alih-alih memperkuat kepercayaan publik, tindakan dan pernyataan tersebut justru merefleksikan kecerobohan komunikatif yang berpotensi menimbulkan dampak destruktif di ruang sosial. Sebagai figur publik, politisi dan pejabat negara memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menghadirkan teladan komunikasi yang konstruktif, mengingat setiap ujaran dan gestur yang disampaikan akan selalu ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat luas, terlebih ketika dimediasi oleh media massa.

Dalam konteks kondisi sosial-ekonomi yang belum stabil—ditandai oleh keterbatasan lapangan kerja, meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta tingginya beban biaya hidup—perilaku simbolik seperti ekspresi kegembiraan berlebihan di ruang kenegaraan cenderung dipersepsikan

sebagai bentuk kurangnya empati sosial. Praktik komunikasi semacam ini memunculkan ketegangan antara representasi elite politik dan realitas keseharian masyarakat, sehingga memperbesar jarak psikologis antara wakil rakyat dan konstituennya.

Lebih jauh, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa gaya komunikasi yang bersifat provokatif dan kontroversial tidak hanya memicu kegaduhan di ruang publik, tetapi juga berpotensi melahirkan instabilitas sosial, termasuk meningkatnya kemarahan kolektif dan gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam skala yang lebih luas, akumulasi praktik komunikasi yang tidak sensitif terhadap konteks sosial dapat mengancam kohesi sosial dan memperlemah integrasi nasional, terutama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung nilai moderasi beragama.

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya internalisasi prinsip-prinsip komunikasi Islam sebagai kerangka etik dalam komunikasi publik dan komunikasi massa. Prinsip berbicara dengan ungkapan yang baik (*Qaulān Ma'rūfān*), benar dan tepat (*Qaulān Sadīdan*), santun (*Qaulān Layyīnan*), serta bermartabat (*Qaulān Karīman*) perlu dijadikan pedoman normatif bagi para tokoh publik dalam menyampaikan pesan, baik secara verbal maupun non-verbal. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berfungsi sebagai panduan etika individual, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menjaga harmoni sosial, memperkuat kepercayaan publik, dan mencegah terjadinya disrupsi komunikasi yang berpotensi merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Referensi

- Aulia, M & Adawiyah, N R. (2024). Upaya Mempertahankan Akhlak Generasi Milenial melalui Hadis 'Hendaklah Berkata Baik atau Diam. *Dirasa Islamiyya*, 11 (2), 217 – 231. <https://doi.org/10.61630/dijis.v3i2.53>.
- Ervina, A, dkk. (2019). Kontroversi Gaya Komunikasi Politik Presiden K.H. Abdurrahman Wahid. *Jurnal Ilmu Komunikasi*

- MEDIAKOM*. 02 (02). <https://jurnal.unmuhjember.ac.id/index.php/mdk/article/view/1921/0>
- Faridah, dkk. (2023). Teori Komunikasi dalam Perspektif Komunikasi Islam. *RETORIKA: Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam*. 5, (1). <https://doi.org/10.47435/retorika.v5i1.1753>
- Fikri, M. (2025). "Kontroversi Dakwah Gus Miftah dalam Diskursus Digital: Analisis Sosio-Kultural Respon Netizen". *Jurnal Komunikasi Islam*. 14 (01). <https://doi.org/10.15642/jki.2025.15.1.100-116>
- Harruma, I. (2025). *Apakah Anggota DPR Termasuk Pejabat Negara?*. Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/18/05000011/apakah-anggota-dpr-termasuk-pejabat-negara->
- Ilaihi, W. (2011). *Komunikasi Dakwah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Khanifah, U N dkk. (2024). Konsep Penguatan Iman kepada Hari Akhir dalam al-Qur'a dan Implikasinya dalam Kehidupan. *AL-QORNI: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*. 9 (1). <https://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alqorni/article/view/7836/4593>
- Lestari, S H & Alwi, M HS. (2020). Kontekstualisasi Hadis 'Berkata Baik atau Diam' sebagai Larangan *Hate Speech* di Media Sosial. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. 3 (2). <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.87>
- Leni, D. (2025, Septm 02). Ini Kejadian yang Picu Demonstrasi Bubarkan DPR. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/politik/ini-kejadian-yang-picu-demonstrasi-bubarkan-dpr-2065603>
- Lubis, M. A. (2018). Komunikasi Nonverbal dalam Perspektif Islam: Studi Tafsir terhadap Surah 'Abasa. *An-Nahdlah*. 1 (1). <https://www.jurnal.stai-nias.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/4/4>
- Muliawati, A. (2025, August 19). Ramai Anggota DPR Joget Saat Sidang Tahunan, Adies Kadir: Itu di Akhir Acara. *Detik.com*:

<https://news.detik.com/berita/d-8068513/ramai-anggota-dpr-joget-saat-sidang-tahunan-adies-kadir-itu-di-akhir-acara>

- Mulyana, D. (2011). *Ilmu Komunikasi; Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Muslimah. (2016). Etika Komunikasi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Sosial Budaya*, 12 (2).
- Musyaffa. (2025, Oct 11). Islam dan Moderasi Beragama: Menakar Nilai-Nilai Terkandung. *Youtube*: https://youtu.be/a-PYPh_R4ns
- Noor, F. (2025). Ketika Rasul Bermuka Masam: Fiqih Sosial Disabilitas. SYASATUNA: *Jurnal Hukum Tata Negara*. 6 (1). <https://doi.org/10.70143/siyasatuna.v6i1.507>
- Puniman, A. (2018). Keutamaan Menjaga Lisan dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Yustitia*, 19 (2). <http://ejournal.unira.ac.id/index.php/yustitia/article/view/478/400>
- Rahyuni, F. (2025, August 25). Muncul Seruan Bubarkan DPR, Sahroni: Orang Tolol Sedunia. *Detik.com*: <https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8074165/muncul-seruan-bubarkan-dpr-sahroni-orang-tolol-sedunia>.
- Rasyid, A & Indra, F. (2024). *Komunikasi Islam: Membangun Dunia Berperadaban*. Jakarta: Kencana.
- Rohman, M. F. (2025, August 19). Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal. *NU Online*: <https://www.nu.or.id/nasional/ramai-kritik-joget-pejabat-ketua-mpr-anggap-hal-normal-G54yc>.
- Saifuddin, L H. (2024). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri.
- Subagio, K T. (2025, Oct 12). Minta Maaf ke Publik, Eko Patrio Jelaskan Kronologi Aksi Joget di Sidang Tahunan MPR. *TVRI News*. <https://nasional.tvrinews.com/berita/tq0ggvr-minta-maaf-ke-publik-eko-patrio-jelaskan-kronologi-aksi-joget-di-sidang-tahunan-mpr>

- Sugiyono & Lestari, P. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel untuk Jurnal Nasional dan Internasional)*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono, S & Irwansyah. (2019). Vlog sebagai Media *Storytelling* Digital bagi Tokoh Publik Pemerintahan. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*. 23 (2). DOI: [10.31445/jskm.2019.2101](https://doi.org/10.31445/jskm.2019.2101)
- Suherdiyanto, dkk. (2025). Moderasi Beragama: Jalan Tengah Menuju Perdamaian Berbasis Nilai-Nilai Universal. *Gervasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 09 (01). DOI: <https://doi.org/10.31571/gervasi.v9i1.8822>
- Sukmaningtyas, A N I, dkk. (2024). Etika Komuniaksi al-Qur'an dan Relevansinya dengan Komunikasi di Zaman Modern. *Jurnal Semiotika: Kajian Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. 4 (2). DOI: <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23981>
- Sutrisna, T & Ramadhan, A. (2025, August 26). Sahroni Jelaskan Soal "Orang Tolol Sedunia" Saat Respons Tuntutan Bubarkan DPR. *Kompas.com*: <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/26/15091011/sahroni-jelaskan-soal-orang-tolol-sedunia-saat-respons-tuntutan-bubarkan-dpr?page=all>.
- Sutrisna, T & Dani P. (2025, Sept 02). 5 Anggota DPR Dinonaktifkan: Akal-akalan Parpol Sembunyikan Uya Kuya CS?. *Kompas*: <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/02/09435221/5-anggota-dpr-dinonaktifkan-akal-akalan-parpol-sembungikan-uya-kuya-cs>.
- Widyatama, E. (2025, August 29). Demo Memanas: Ini Kronologi Kericuhan & Tuntutan Massa yang Menggema. *CNBC Indonesia*: <https://www.cnbcindonesia.com/research/20250829112149-128-662500/demo-memanas-ini-kronologi-kericuhan-tuntutan-massa-yang-menggema>